

BENCANA KORUPSI

Disampaikan dalam forum diskusi seputar korupsi
Selasa, 28 April 2020

Agus Sarwono | Transparency International Indonesia



: www.ti.or.id

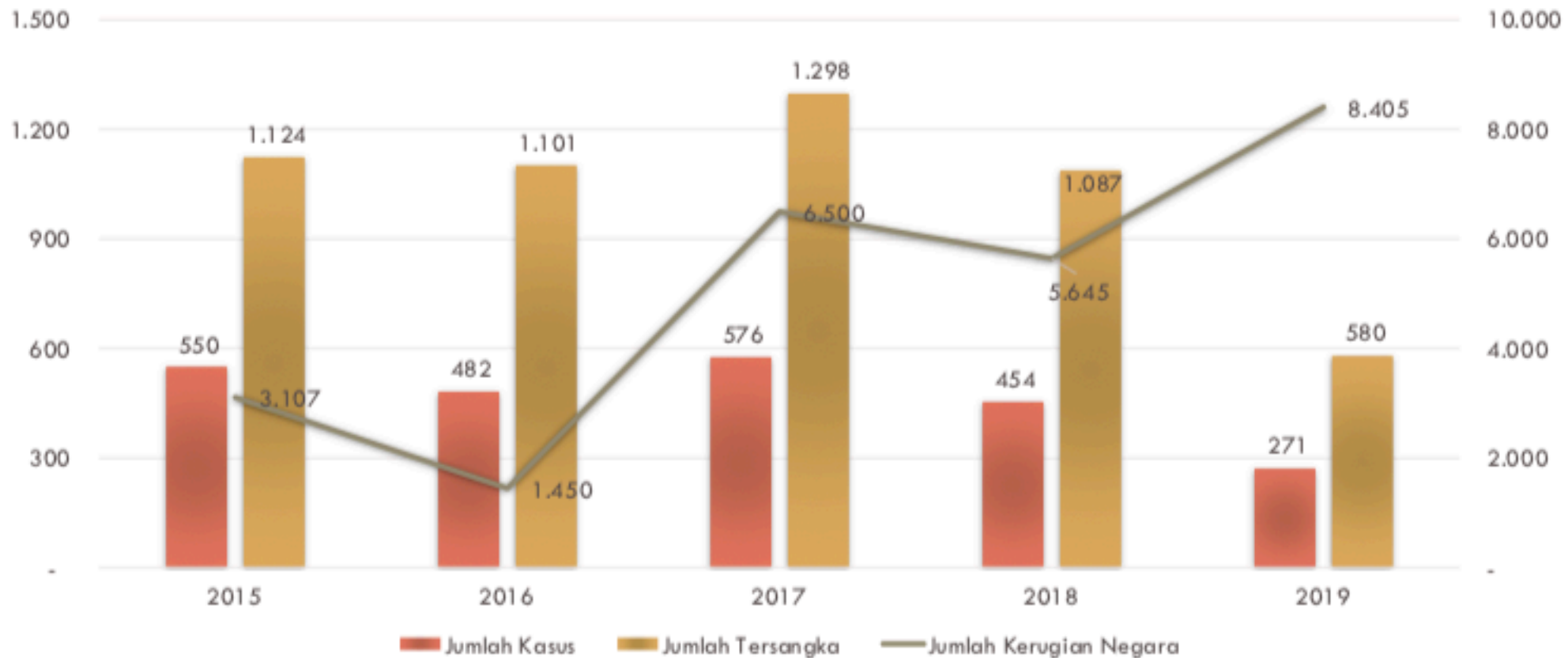


: @TIIndonesia



: @TIIndonesia

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2015-2019



- ✗ Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari aspek kasus maupun tersangka.
- ✗ Kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif
- ✗ **Pada 2019, sebanyak 64% kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa**

KORUPSI Berdasarkan Jenis Anggaran

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian negara	Nilai Suap
1	Pengadaan	174	Rp 957,3 miliar	Rp 91,5 miliar
2	Non Pengadaan	97	Rp 7,4 triliun	Rp 109,3 miliar

- ✓ Korupsi pengadaan barang dan jasa secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan non pengadaan. Meskipun demikian, dampak kerugian ekonomi yang sangat besar muncul dari aspek non pengadaan.
- ✓ Dampak korupsi di sektor pengadaan terletak pada buruknya kualitas barang publik, tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat membahayakan masyarakat, misalnya buruknya kualitas gedung sekolah yang bisa berakibat pada ambruknya gedung sekolah dan mengancam nyawa siswa yang sedang belajar.

Sumber : ICW - TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2019

Korupsi berdasarkan sektor (10 besar) 2019

No	Keterangan	Jumlah	Kerugian Negara	Suap	Pungli	Pencucian Uang
1	Bencana Alam	5	Rp2,1 miliar	Rp460 juta	Rp10 juta	-
2	Pertambangan	4	Rp5,9 triliun	-	-	-
3	Pengadilan (Hukum)	3	-	Rp246 juta	-	-
4	Kejaksaan dan Kepolisian (Hukum)	3	-	Rp136,5 juta	Rp1 miliar	-
5	Lapas	2	Rp1 miliar	-	-	-

- ✓ Kasus pada sektor bencana alam seperti kasus dugaan korupsi dana bencana gempa Lombok.
- ✓ Kasus pada sektor pertambangan yang menimbulkan kerugian negara sangat besar seperti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati di Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Nilai kerugian negaranya mencapai Rp5,8 triliun.
- ✓ Kasus pada sektor peradilan seperti kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung yang melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi.
- ✓ Kasus pada sektor penegakan antara lain: 1). pemerasan saksi kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari yang dilakukan oleh Jaksa; dan 2). Kasus dugaan pungutan liar untuk membebaskan tersangka kasus penadahan barang curian yang dilakukan oleh polisi.
- ✓ Kasus pada sektor lapas seperti suap pemberian fasilitas atau perizinan ke luar lapas Klas I Sukamiskin yang dilakukan oleh Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Huesin.

Kasus-kasus Korupsi di Kebencanaan

1. Mantan Bupati Nias

Pada tahun 2011, eks Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha pernah terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias, Sumut yang dilakukan sejak tahun 2006-2008. Dugaan korupsi itu nilainya sebesar Rp 3,7 miliar dari Rp 9,4 miliar yang dikucurkan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah tersangka lain juga dijadikan terdakwa, yakni mereka yang menerima dana korupsi bencana alam tersebut antara lain anggota DPRD Kabupaten Nias.

2. Eks Anggota DPRD Mataram

Pada tahun September 2019, mantan Anggota DPRD Mataram dari Fraksi Golkar Muhir terjaring OTT Kejari Mataram terkait kasus pungli bencana alam.

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh Muhir itu bersumber dari dana proyek senilai Rp 4,2 miliar yang dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2018. Dana itu untuk perbaikan 14 unit gedung SD dan SMP terdampak bencana gempa bumi di Kota Mataram.

3. Korupsi Proyek Penyediaan Air di Daerah Bencana

Pada Desember 2018, KPK menggelar OTT terhadap delapan pejabat PUPR. OTT ini terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Beberapa proyek pembangunan SPAM diketahui berada daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang saat itu baru terkena bencana tsunami.

4. Korupsi Rehab Masjid di NTB

Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid. Namun ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan.

Buntutnya, ditetapkanlah tiga tersangka yang merupakan ASN dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB tersebut berinisial BA, IK, dan SL. SL diketahui inisial dari H. Silmi.

Korupsi dalam Pandemi



Pengaruh Pandemi Covid Pada Pengadaan

- ✓ Pandemi meningkatkan *demand* secara internasional
- ✓ Fleksibilitas & Attractiveness menjadi kunci, namun tetap **transparan dan akuntabel**
- ✓ Kebijakan pembatasan migrasi orang/barang dari dan ke luar negeri mempengaruhi pengadaan Nasional

Indonesia #LawanKorona

01

Keputusan Ka BNPB 9A & 13A Th 2020

Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia

02

Keppres 9/2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

03

Inpres 4/2020

Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, Serta PBJ Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19

04

Keuangan & Reviu

Permendagri 20/2020 Pecepatan Penanganan
Covid-19 di Pemda
SE 6 BPKP Tata Cara Reviu PBJ Covid-19
S-247/MK Penghentian PBJ DAK Fisik 2020

05

SE Ka LKPP 3/2020

Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19
sesuai **Perpres 16/18 & PerLKPP 13/18**)

SE Ka LKPP 4/2020 Klarifikasi & Nego

“

"peningkatan langkah-
langkah ekstra dalam
penanganan pandemi
COVID19 di Indonesia"

Joko Widodo

Presiden RI
15 Maret 2020

COVID-19

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat



Pedoman Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam PerLKPP 13/2018

Keadaan **darurat** berhubungan dengan keselamatan manusia yang bersifat **sangat mendesak** dan perlu ditangani **segera**

Memerlukan mekanisme pengadaan untuk mencapai **tujuan yang cepat dan memadai** dan tetap selaras dengan **prinsip** pengadaan

Dalam Perpes 16 Tahun 2018, Pengadaan Dalam Keadaan Darurat diatur dalam Bab VIII Pengadaan Khusus

Strategi Penanggulangan Keadaan Darurat satu kesatuan dengan a.l. UU No. 24/2007 Peanggulangan Bencana, PP 21/2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perpres 17 Tahun 2018

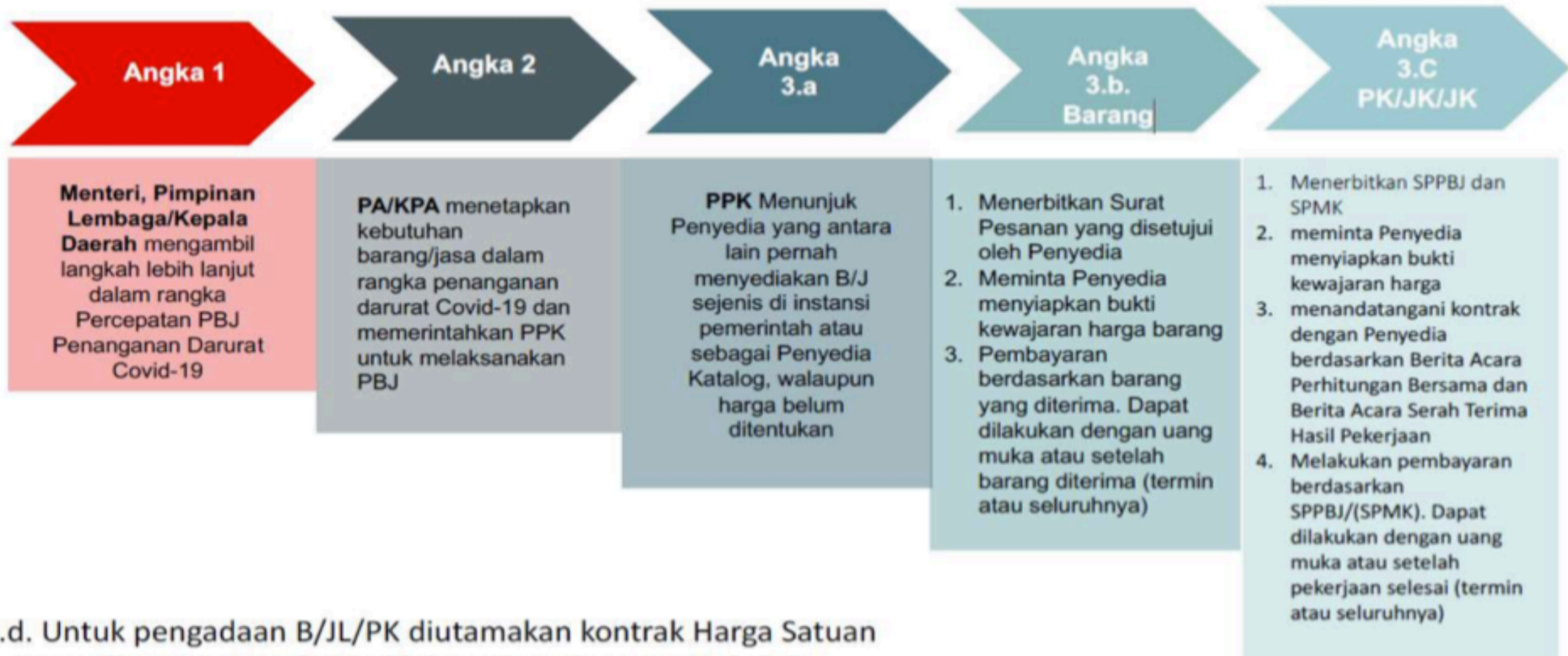
Penanganan Keadaan Darurat (Pasal 59 Perpres 16 Tahun 2018)

“Penanganan Keadaan Darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera”

Kriteria Keadaan Darurat

- ✓ Bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial
- ✓ Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- ✓ Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- ✓ Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri
- ✓ Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana

SE 3/2020 LKPP, Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ Penanganan Darurat Covid-19



3.d. Untuk pengadaan B/JL/PK diutamakan kontrak Harga Satuan

4. Pengadaan Darurat dapat dilaksanakan dengan Swakelola

5. Untuk memastikan harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit kepada APIP/BPKP

6. Para Pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan

Tahapan Pengadaan

Peraturan LKPP Nomor 13/2018

Perencanaan

- Identifikasi Kebutuhan
- Analisis ketersediaan sumber daya
- Penetapan cara pengadaan

Pelaksanaan pemilihan

- Pemilihan dan penunjukan penyedia
- SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)

Pelaksanaan Pekerjaan

- Pemeriksaan lokasi
- Serah terima lokasi
- SPMK/SPP
- Pelaksanaan Pekerjaan
- Perhitungan hasil pekerjaan
- Serah terima hasil Pekerjaan

Penyelesaian Pembayaran

- Kontrak
- Pembayaran
- Audit

Potensi Korupsinya ada ditahap apa?

Perencanaan

- Pengadaan tidak sesuai kebutuhan
- Tidak ada verifikasi faktual kebutuhan barang
- Penetapan cara pengadaan tidak sesuai

Pelaksanaan pemilihan

- Konflik Kepentingan
- Suap untuk menjadi penyedia
- Mark up harga

Pelaksanaan Pekerjaan

- Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan

Penyelesaian Pembayaran

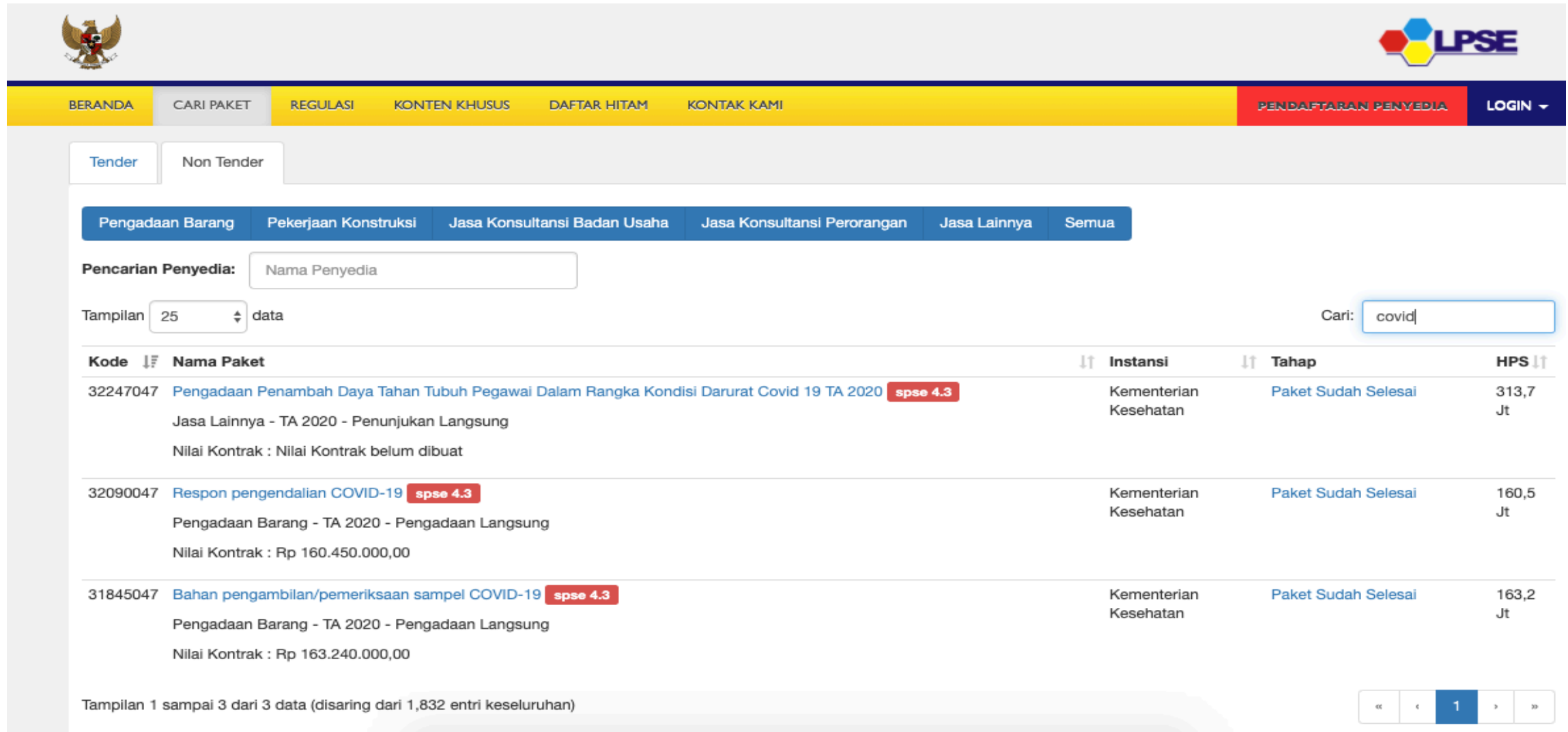
- Kickback
- Audit tidak sesuai prosedur

KENAPA?

Mari kita lihat Keadaan Indonesia:

- Informasi mengenai pengadaan untuk penanganan covid-19 kurang transparan
- Data kebutuhan alkes dan kebutuhan obat tidak terintegrasi antara pusat dan daerah. Dan berpotensi *double budget*
- Pengadaan yang dilakukan BUMN?
- Bantuan swasta dan masyarakat melalui gugus tugas tidak dapat diakses publik

Pengadaan Darurat Covid19 di LPSE Kemkes



The screenshot shows the LPSE Kemkes website interface. At the top, there is a navigation bar with links: BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, KONTAK KAMI, PENDAFTARAN PENYEDIA, and LOGIN. Below the navigation bar, there are tabs for 'Tender' and 'Non Tender'. Underneath, there are filters for 'Pengadaan Barang', 'Pekerjaan Konstruksi', 'Jasa Konsultasi Badan Usaha', 'Jasa Konsultasi Perorangan', 'Jasa Lainnya', and 'Semua'. A search bar labeled 'Pencarian Penyedia:' contains the text 'Nama Penyedia'. Below the search bar, there is a 'Tampilan' dropdown set to '25' and a 'Cari:' input field containing 'covid'. The main content area displays a table of procurement packages. The table has columns for 'Kode', 'Nama Paket', 'Instansi', 'Tahap', and 'HPS'. Three packages are listed, all with a 'spse 4.3' status. The first package is for 'Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai Dalam Rangka Kondisi Darurat Covid 19 TA 2020' with a value of 313,7 Jt. The second is 'Respon pengendalian COVID-19' with a value of 160,5 Jt. The third is 'Bahan pengambilan/pemeriksaan sampel COVID-19' with a value of 163,2 Jt. At the bottom, there is a pagination bar showing '1' of 3 pages.

Kode	Nama Paket	Instansi	Tahap	HPS
32247047	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai Dalam Rangka Kondisi Darurat Covid 19 TA 2020 spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2020 - Penunjukan Langsung Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kementerian Kesehatan	Paket Sudah Selesai	313,7 Jt
32090047	Respon pengendalian COVID-19 spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp 160.450.000,00	Kementerian Kesehatan	Paket Sudah Selesai	160,5 Jt
31845047	Bahan pengambilan/pemeriksaan sampel COVID-19 spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp 163.240.000,00	Kementerian Kesehatan	Paket Sudah Selesai	163,2 Jt

Tampilan 1 sampai 3 dari 3 data (disaring dari 1,832 entri keseluruhan)

Sumber: <http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4/nontender> (tgl 27 April 2020)

Tampilkan 10 entri

Cari: covid

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/PD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Penyediaan Alat Kesehatan untuk mendukung RS Rujukan Covid-19	274,42 M	Barang	E-Purchasing	March 2020	Kementerian Kesehatan	DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		25498821
2	Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Lainnya untuk Fasilitas Penampungan/Karantina dan Observasi COVID-19 di Pulau Galang	72,28 M	Barang	E-Purchasing	March 2020	Kementerian Kesehatan	DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		25438891
3	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tanggap COVID-19	58,44 M	Barang	E-Purchasing	March 2020	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	DINAS KESEHATAN		25485282
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan Tanggap COVID-19	33,03 M	Barang	E-Purchasing	March 2020	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	DINAS KESEHATAN		25485191
5	Pengadaan alat kedokteran di IGD, IBS, NICU, PICU, HCU dan Rawat Inap dan Alat kesehatan COVID 19	17,26 M	Barang	E-Purchasing	January 2020	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	RSUD AMBARAWA KAB SEMARANG		25555615
6	Belanja Modal Alat Kesehatan Covid 19	15,25 M	Barang	E-Purchasing	April 2020	Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	DINAS KESEHATAN		25574548
7	Pengadaan Alat Kesehatan Ventilator ICU untuk Covid-19	14,53 M	Barang	E-Purchasing	April 2020	Kementerian Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR		25588639
8	Pengadaan Ambulans Puskesmas - Covid-19	13,63 M	Barang	Penunjukan Langsung	March 2020	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	DINAS KESEHATAN		25451505

Sampai 27 April 2020, sebanyak 1030 pengadaan dg kata kunci COVID yg diadakan oleh pemerintah pusat dah daerah.

Sumber: sirup.lkpp.go.id

Rincian Informasi di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Paket Penyedia

PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG RS RUJUKAN COVID-19

Detail Paket

PAGU:
274,42 M

Kode RUP : 25498821
 Nama Paket : Penyediaan Alat Kesehatan untuk mendukung RS Rujukan Covid-19
 KLPD : Kementerian Kesehatan
 Satuan Kerja : DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 Tahun Anggaran : 2020

Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
	1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Volume Pekerjaan : 1 Paket
 Uraian Pekerjaan : Sesuai KAK
 Spesifikasi Pekerjaan : Penyediaan Alat Kesehatan untuk mendukung RS Rujukan Covid-19
 Produk Dalam Negeri : Ya
 Usaha Kecil : Ya
 Pra DIPA / DPA : Tidak

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN	2020	Kementerian Kesehatan	07.2051.522.001.055.ID.532111	274417778000
Total Pagu						274417778000

Jenis Pengadaan : Barang,
 Total Pagu : 274417778000
 Metode Pemilihan : E-Purchasing

Waktu	Pemanfaatan Barang/Jasa :	Maret 2020	-	Maret 2020
	Pelaksanaan Kontrak :	Maret 2020	-	April 2020
	Pemilihan Penyedia :	Maret 2020	-	Maret 2020

Histori Paket : 25494584 - Penyediaan Alat Kesehatan untuk mendukung RS Rujukan Covid-19

Tanggal Perbarui : 2020-03-30 15:46:02.556

PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DAN ALAT PENUNJANG LAINNYA UNTUK FASILITAS PENAMPUNGAN/KARANTINA DAN OBSERVASI COVID-19 DI PULAU GALANG

Detail Paket

PAGU:
72,28 M

Kode RUP : 25438891
 Nama Paket : Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Lainnya untuk Fasilitas Penampungan/Karantina dan Observasi COVID-19 di Pulau Galang
 KLPD : Kementerian Kesehatan
 Satuan Kerja : DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 Tahun Anggaran : 2020

Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
	1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Volume Pekerjaan : 1 Paket
 Uraian Pekerjaan : Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Lainnya untuk Fasilitas Penampungan/Karantina dan Observasi COVID-19 di Pulau Galang
 Spesifikasi Pekerjaan : Sesuai KAK
 Produk Dalam Negeri : Ya
 Usaha Kecil : Ya
 Pra DIPA / DPA : Tidak

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN	2020	Kementerian Kesehatan	07.2051.518.059.59A.0C.532111	72283657869
Total Pagu						72283657869

Jenis Pengadaan : Barang,
 Total Pagu : 72283657869
 Metode Pemilihan : E-Purchasing

Waktu	Pemanfaatan Barang/Jasa :	Maret 2020	-	Maret 2025
	Pelaksanaan Kontrak :	Maret 2020	-	Maret 2020
	Pemilihan Penyedia :	Maret 2020	-	Maret 2020

Tanggal Perbarui : 2020-03-22 16:03:53.554

Apakah informasi ini cukup untuk melihat seberapa efektif pengadaan pemerintah dan kewajaran harganya?

Darurat Sekalipun, Pengadaan Harus Terbuka

1. Dalam keadaan darurat, pemerintah harus melakukan pengadaan dengan cepat dan fleksibel, pemerintah perlu melakukan pembayaran di muka dengan jumlah besar untuk menjamim persediaan barang.
2. Tapi pengadaan tersebut harus **transparan dan akuntabel**.
3. Peran pemerintah dalam mengelola pengadaan di masa pandemi akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Covid 19, Apa yang dilakukan pemerintah?



Pembelajaran dari Negara lain

Negara	Pembelajaran
Colombia	<ul style="list-style-type: none">• Penunjukan langsung, namun data PBJ dapat diakses oleh publik• Data disimpan di platform terpusat dan bisa dilihat oleh semua pemangku kepentingan agar kontrak langsung di tingkat nasional dan daerah bisa dipantau• Mekanisme pelaporan warga untuk informasi penyalahgunaan dana publik
Itali	<ul style="list-style-type: none">• Proses PBJ yang tersentralisasi dan disederhanakan• LKPP Itali menjadi PIC untuk pengadaan ventilator dan melakukan <i>open requests ke market</i>
Ukraina	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat sipil mengambil peran dalam monitoring data pengadaan barang/jasa• Pemerintah Ukraina menyediakan prosedur pemantauan pengadaan

Rekomendasi

1. Membuka informasi kebutuhan barang/jasa dalam merespon krisis yang tengah berlangsung
2. Menyediakan informasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan bencana secara **serta merta (*real time*)** dan **terintegrasi** antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Informasi tersebut terpublikasi di website gugus tugas/Kemkes di tingkat nasional dan daerah)
3. Membuka informasi kewajaran harga barang/jasa kepada publik
4. Membuka akses kontrak pengadaan barang dan jasa kepada publik
5. Menutup ruang/celah praktik koruptif dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 dengan melibatkan masyarakat sipil. Dan memastikan sumber daya yang ada dialokasikan secara efektif dan efisien, serta menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.